



**BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 40 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023**



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Bupati of Lembata.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.



5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

h p

14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp841.837.100.522,00 bertambah sebesar Rp41.935.746.724,00 sehingga menjadi Rp883.772.847.246,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp48.030.773.975,00 bertambah Rp14.565.060.410,00 sehingga menjadi Rp62.595.834.385,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp13.924.162.606,00 bertambah sebesar Rp5.008.600.335,00 sehingga menjadi Rp18.932.762.941,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp20.581.971.264,00 bertambah Rp5.591.087.843,00 sehingga menjadi Rp26.173.059.107,00.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.424.695.711,00 berkurang sebesar Rp103.139.433,00 sehingga menjadi Rp4.321.556.278,00.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp9.099.944.394,00 bertambah sebesar Rp4.068.511.665,00 sehingga menjadi Rp13.168.456.059,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp13.924.162.606,00 bertambah sebesar Rp5.008.600.335,00 sehingga menjadi Rp18.932.762.941,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

LKR

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp87.500.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.108.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.300.000.000,00 sehingga menjadi Rp2.408.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 sehingga menjadi Rp140.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.515.610.663,00 bertambah sebesar Rp1.969.440.335,00 sehingga menjadi Rp4.485.050.998,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp7.363.051.943,00 bertambah sebesar Rp1.989.160.000,00 sehingga menjadi Rp9.352.211.943,00
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 berkurang sebesar Rp350.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.000.000.000,00.
- (10) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 sehingga menjadi Rp450.000.000,00.

167

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula direncanakan sebesar Rp20.581.971.264,00, bertambah sebesar Rp5.591.087.843,00 sehingga menjadi Rp26.173.059.107,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp17.514.626.000,00 bertambah sebesar Rp5.453.309.843,00 sehingga menjadi Rp22.967.935.843,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.862.795.264,00 bertambah sebesar Rp76.356.000,00 sehingga menjadi Rp2.939.151.264,00.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.204.550.000,00 bertambah sebesar Rp61.422.000,00 sehingga menjadi Rp265.972.000,00.

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.424.695.711,00 berkurang sebesar Rp103.139.433,00 sehingga menjadi Rp4.321.556.278,00 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula direncanakan sebesar Rp9.099.944.394,00 bertambah sebesar Rp4.068.511.665,00 sehingga menjadi Rp13.168.456.059,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;



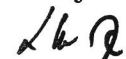
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;
 - g. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - j. Pendapatan dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 berkurang sebesar Rp600.000.000,00 sehingga menjadi Rp0,00.
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 bertambah sebesar Rp27.020.000,00 sehingga menjadi Rp29.520.000,00.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp497.515.774,00 bertambah sebesar Rp402.148 sehingga menjadi Rp497.917.922,00.
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.700.000.000,00 sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00.
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp6.815.341.873,00 berkurang sebesar Rp2.140.692.581,00 sehingga menjadi Rp4.674.649.292,00.

162

- (7) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp153.000.000,00 bertambah sebesar Rp47.760.000,00 sehingga menjadi Rp200.760.000,00.
- (8) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp4.600.000.000,00 sehingga menjadi Rp4.600.000.000,00.
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp1.231.665,00 sehingga menjadi Rp1.231.665,00.
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp16.150.000,00 berkurang sebesar Rp7.500.000,00 sehingga menjadi Rp8.650.000,00.
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp215.436.747,00 bertambah sebesar Rp440.290.433 sehingga menjadi Rp655.727.180,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp785.998.136.547,00 bertambah sebesar Rp27.120.686.314,00 sehingga menjadi Rp813.118.822.861,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp765.140.417.000,00 bertambah sebesar Rp17.041.401.900,00 sehingga menjadi Rp782.181.818.900,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00 bertambah sebesar Rp10.079.284.414 sehingga menjadi Rp30.937.003.961,00



Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp765.140.417.000,00 bertambah sebesar Rp17.041.401.900,00 sehingga menjadi Rp782.181.818.900,00 yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp643.612.022.000,00 berkurang sebesar Rp206.665.900,00 sehingga menjadi Rp643.818.687.900,00.
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp16.834.736.000,00 sehingga menjadi Rp16.834.736.000,00.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp121.528.395.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp20.857.719.547,00 bertambah sebesar Rp10.079.284.414,00 sehingga menjadi Rp30.937.003.961,00 yaitu Pendapatan Bagi hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp20.857.719.547,00 bertambah sebesar Rp10.079.284.414,00 sehingga menjadi Rp30.937.003.961,00.

Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp643.612.022.000,00 berkurang sebesar Rp206.665.900,00 sehingga menjadi Rp643.818.687.900,00 yang terdiri atas:



- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.273.295.000,00 bertambah sebesar Rp144.799.000,00 sehingga menjadi Rp5.418.094.000,00.
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp456.993.936.000,00 tidak mengalami perubahan.
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp103.844.039.000,00 berkurang sebesar Rp575.005.000,00 sehingga menjadi Rp103.269.034.000,00.
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp77.500.752.000,00 berkurang sebesar Rp636.871.900,00 sehingga menjadi Rp78.137.623.900,00.

Pasal 13

- (1) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp16.834.736.000,00 sehingga menjadi Rp16.834.736.000,00 yaitu Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp16.834.736.000,00 sehingga menjadi Rp16.834.736.000,00.



Pasal 14

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp121.528.395.000,00 tidak mengalami perubahan yaitu Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp.121.528.395.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp20.857.719.547,00 bertambah sebesar Rp10.079.284.414 sehingga menjadi Rp30.937.003.961,00 yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp20.857.719.547,00 bertambah sebesar Rp10.079.284.414 sehingga menjadi Rp30.937.003.961,00.

Pasal 16

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi Rp8.058.190.000 yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi Rp250.000.000,00.
- (3) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 tidak mengalami perubahan.



Pasal 17

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi Rp250.000.000,00 yaitu Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi Rp250.000.000,00.

Pasal 18

- (1) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 tidak mengalami perubahan yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 19

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp816.563.275.307,00 bertambah sebesar Rp140.045.296.098,00 sehingga menjadi Rp956.608.571.405,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.



Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a semula direncanakan sebesar Rp520.794.574.714,00 bertambah sebesar Rp46.653.718.000,00 sehingga menjadi Rp567.448.292.714,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp346.774.367.893,00 berkurang sebesar Rp4.396.671.382,00 sehingga menjadi Rp342.377.696.511,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp148.784.218.295,00 bertambah sebesar Rp45.458.070.051,00 sehingga menjadi Rp194.242.288.346,00.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp13.395.930.204,00 berkurang sebesar Rp2.826.012.547,00 sehingga menjadi Rp10.569.917.657,00.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.116.683.322,00 bertambah sebesar Rp10.634.706,878 sehingga menjadi Rp13.751.390.200,00.
- (6) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp8.723.375.000,00 berkurang sebesar Rp2.216.375.000,00 sehingga menjadi Rp6.507.000.000,00.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp346.774.367.893,00 berkurang sebesar Rp4.396.671.382,00 sehingga menjadi Rp342.377.696.511,00 yang terdiri atas:

162

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp269.972.921.343,00 berkurang sebesar Rp5.027.687.323,00 sehingga menjadi Rp264.945.234.020,00.
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp18.687.624.396,00 bertambah sebesar Rp816.972.666,00 sehingga menjadi Rp.19.504.597.062,00.
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp46.476.717.764,00 berkurang sebesar Rp441.176.205,00 sehingga menjadi Rp46.035.541.559,00.
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp11.238.224.390,00 tidak mengalami perubahan.
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp211.597.044,00 sehingga menjadi Rp211.597.044,00.
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp398.880.000,00 bertambah sebesar Rp43.622.436,00 sehingga menjadi Rp442.502.436,00.



Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp269.972.921.343,00 berkurang sebesar Rp5.027.687.323,00 sehingga menjadi Rp264.945.234.020,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp200.622.608.784,00 berkurang sebesar Rp129.302.528,00 sehingga menjadi Rp200.493.306.256,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.866.692.382,00 berkurang sebesar Rp2.404.838.457,00 sehingga menjadi Rp19.461.853.925,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.606.671.125,00 berkurang sebesar Rp639.265.517,00 sehingga menjadi Rp5.967.405.608,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp13.115.073.990,00 berkurang sebesar Rp104.579.440,00 sehingga menjadi Rp13.010.494.550,00. /kq

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp3.142.425.477,00 bertambah sebesar Rp92.868.107,00 sehingga menjadi Rp3.235.293.584,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp13.151.097.368,00 berkurang sebesar Rp848.455.586,00 sehingga menjadi Rp12.302.641.782,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp416.406.525,00 bertambah sebesar Rp39.889.332,00 sehingga menjadi Rp456.295.857,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp3.512.275,00 berkurang sebesar Rp.388.067,00 sehingga menjadi Rp3.124.208,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp9.217.760.246,00 berkurang sebesar Rp831.594.000 sehingga menjadi Rp8.386.166.246,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp455.004.182,00 berkurang sebesar Rp49.574.011 sehingga menjadi Rp405.430.171,00.
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp1.375.668.989,00 berkurang sebesar Rp152.447.156,00 sehingga menjadi Rp1.223.221.833,00

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp18.687.624.396,00 bertambah sebesar Rp816.972.666,00 sehingga menjadi Rp19.504.597.062,00 yaitu Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN.



- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp18.687.624.396,00 bertambah sebesar Rp816.972.666,00 sehingga menjadi Rp19.504.597.062,00.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp46.476.717.764,00 berkurang sebesar Rp441.176.205,00 sehingga menjadi Rp46.035.541.559,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp361.975.043,00 bertambah sebesar Rp.26.428.204,00 sehingga menjadi Rp388.403.247,00.
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp801.000.000,00 berkurang sebesar Rp756.000.000,00 sehingga menjadi Rp45.000.000,00.

LR

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp24.826.019.500,00 berkurang sebesar Rp1.666.240.500,00 sehingga menjadi Rp23.159.779.000,00.
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.094.962.750,00 bertambah sebesar Rp356.707.250,00 sehingga menjadi Rp3.451.670.000,00.
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp1.785.500.000,00 sehingga menjadi Rp1.785.500.000,00.
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp9.185.671.271,00 berkurang sebesar Rp274.151.959,00 sehingga menjadi Rp8.911.519.312,00.
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp7.107.163.200,00 bertambah sebesar Rp83.966.800,00 sehingga menjadi Rp7.191.130.000,00.
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp1.099.926.000,00 berkurang sebesar Rp2.614.000,00 sehingga menjadi Rp1.102.540.000,00.

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp11.238.224.390,00 tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

Handwritten signature

- f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 tidak mengalami perubahan.
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp47.245.800,00 tidak mengalami perubahan.
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp56.487.600,00 tidak mengalami perubahan.
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp56.154.000,00 tidak mengalami perubahan.
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 tidak mengalami perubahan.
 - (7) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp104.315.610,00 tidak mengalami perubahan.
 - (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp9.409.050,00 tidak mengalami perubahan.
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

119

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp472.500.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp516.950,00 tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp2.566.222.380,00 tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp4.659.600.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp211.597.044,00 sehingga menjadi Rp211.597.044,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp75.018.380,00 sehingga menjadi Rp75.018.380,00.
- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp136.578.664,00 sehingga menjadi Rp136.578.664,00.

169

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp398.880.000,00 bertambah sebesar Rp43.622.436,00 sehingga menjadi Rp442.502.436,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Insentif Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 bertambah sebesar Rp43.622.436,00 sehingga menjadi Rp331.622.436,00.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp148.784.218.295,00 bertambah sebesar Rp45.458.070.051,00 sehingga menjadi Rp194.242.288.346,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp53.565.522.033,00 bertambah sebesar Rp9.978.036.791,00 sehingga menjadi Rp63.543.558.824,00.

19

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp43.974.657.635,00 bertambah sebesar Rp21.854.025.717,00 sehingga menjadi Rp65.828.683.352,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.249.191.096,00 bertambah sebesar Rp5.646.299.724,00 sehingga menjadi Rp10.895.490.820,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp27.632.692.793,00 bertambah sebesar Rp4.639.092.461,00 sehingga menjadi Rp32.271.785.254,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.438.046.285,00 bertambah sebesar Rp700.074.715,00 sehingga menjadi Rp2.138.121.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp16.924.108.453,00 bertambah sebesar Rp2.640.540.643,00 sehingga menjadi Rp19.564.649.096,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp13.395.930.204,00 berkurang sebesar Rp2.826.012.547,00 sehingga menjadi Rp10.569.917.657,00 yaitu belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp13.395.930.204,00 berkurang sebesar Rp2.826.012.547,00 sehingga menjadi Rp10.569.917.657,00.

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.116.683.322,00 bertambah sebesar Rp10.634.706.878,00 sehingga menjadi Rp13.751.390.200,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.615.682.302,00 bertambah sebesar Rp10.634.706.878,00 sehingga menjadi Rp13.250.389.180,00.
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp501.001.020,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp8.723.375.000,00 berkurang sebesar Rp2.216.375.000,00 sehingga menjadi Rp6.507.000.000,00 yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp8.723.375.000,00 berkurang sebesar Rp2.216.375.000,00 sehingga menjadi Rp6.507.000.000,00.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b semula direncanakan sebesar Rp123.409.062.571,00 bertambah sebesar Rp93.806.667.674,00 sehingga menjadi Rp.217.215.730.245,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

169

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak direncanakan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp27.860.510.629,00 berkurang sebesar Rp2.970.975.193,00 sehingga menjadi Rp27.398.608.799,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp19.474.837.072,00 bertambah sebesar Rp7.742.619.406,00 sehingga menjadi Rp27.217.456.478,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp72.867.614.608,00 bertambah sebesar Rp89.595.326.351,00 sehingga menjadi Rp162.462.940.959,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp3.206.100.262,00 berkurang sebesar Rp560.302.890,00 sehingga menjadi Rp2.645.797.372,00.

Pasal 33

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c semula direncanakan sebesar Rp17.282.225.300,00 berkurang sebesar Rp16.501.511.404,00 sehingga menjadi Rp780.713.896,00.

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d semula direncanakan sebesar Rp155.077.412.722,00 bertambah sebesar Rp16.086.421.828,00 sehingga menjadi Rp171.163.834.550,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.364.999.222,00 bertambah sebesar Rp2.058.197.126,00 sehingga menjadi Rp3.423.196.348,00.

LKP

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp153.712.413.500,00 bertambah sebesar Rp14.028.224.702,00 sehingga menjadi Rp167.740.638.202,00.

Pasal 35

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp95.579.997.871,00 sehingga menjadi Rp95.579.997.871,00 yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp.95.579.997.871,00 sehingga menjadi Rp95.579.997.871,00.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan.

Pasal 37

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b semula direncanakan sebesar Rp25.273.825.215,00 berkurang sebesar Rp2.529.551.503,00 sehingga menjadi Rp22.744.273.712,00 yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.



- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp22.773.825.215,00 berkurang sebesar Rp2.529.551.503,00 sehingga menjadi Rp20.244.273.712,00.

Pasal 38

- (1) Selisih APBD dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp72.835.724.159,00.
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp72.835.724.159,00.

Pasal 39

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran terdiri dari:

1. LampiranI Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. LampiranII Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. LampiranIII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. LampiranIV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. LampiranV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

LWA

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 19 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN


Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,


PASKALIS OTA TAPO BALI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 40

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 40 Tahun 2023
 Tanggal : 19 Oktober 2023

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.030.773.975	62.595.834.385	14.565.060.410	30 %
4.1.01	Pajak Daerah	13.924.162.606	18.932.762.941	5.008.600.335	36 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	87.500.000	87.500.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	70.000.000	70.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	70.000.000	70.000.000	0	0 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000	2.500.000	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000	2.500.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.108.000.000	2.408.000.000	1.300.000.000	117 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000	38.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000	38.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000	2.300.000.000	1.300.000.000	130 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000	2.300.000.000	1.300.000.000	130 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000	5.000.000	0	0 %

4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	90.000.000	140.000.000	50.000.000	56 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	81.500.000	79.000.000	(2.500.000)	3 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	81.500.000	79.000.000	(2.500.000)	3 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	7.500.000	60.000.000	52.500.000	700 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	7.500.000	60.000.000	52.500.000	700 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.515.610.663	4.485.050.998	1.969.440.335	78 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.515.610.663	4.485.050.998	1.969.440.335	78 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.515.610.663	4.485.050.998	1.969.440.335	78 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.363.051.943	9.352.211.943	1.989.160.000	27 %
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000	1.562.500.000	0	0 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000	1.562.500.000	0	0 %
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.875.000	1.875.000	0	0 %
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.875.000	1.875.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943	6.537.836.943	1.989.160.000	44 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943	6.537.836.943	1.989.160.000	44 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.350.000.000	2.000.000.000	(350.000.000)	15 %
4.1.01.15.01	PBBP2	2.350.000.000	2.000.000.000	(350.000.000)	15 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.350.000.000	2.000.000.000	(350.000.000)	15 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.581.971.264	26.173.059.107	5.591.087.843	27 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	17.514.626.000	22.967.935.843	5.453.309.843	31 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.643.010.000	22.096.319.843	5.453.309.843	33 %

4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.400.970.000	1.400.970.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.242.040.000	20.695.349.843	5.453.309.843	36 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000	175.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000	175.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000	49.875.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000	49.875.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	427.496.000	427.496.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	78.000.000	78.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	349.496.000	349.496.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	97.745.000	97.745.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	97.745.000	97.745.000	0	0 %
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000	1.500.000	0	0 %
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	1.500.000	1.500.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.862.795.264	2.939.151.264	76.356.000	3 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	733.563.864	801.359.864	67.796.000	9 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	222.703.500	277.023.500	54.320.000	24 %
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	32.430.000	62.230.000	29.800.000	92 %
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.900.000	7.700.000	3.800.000	97 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	19.500.000	19.500.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	112.526.364	98.686.364	(13.840.000)	12 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	287.804.000	281.520.000	(6.284.000)	2 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	54.700.000	54.700.000	0	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	52.000.000	52.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	52.000.000	52.000.000	0	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	86.640.000	86.640.000	0	0 %
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	86.640.000	86.640.000	0	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	293.240.000	304.360.000	11.120.000	4 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	293.240.000	304.360.000	11.120.000	4 %
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.303.391.400	1.303.391.400	0	0 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.303.391.400	1.303.391.400	0	0 %

4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	32.000.000	29.440.000	(2.560.000)	8 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	32.000.000	29.440.000	(2.560.000)	8 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	361.960.000	361.960.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	71.970.000	71.970.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	135.000.000	135.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	154.990.000	154.990.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	204.550.000	265.972.000	61.422.000	30 %
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000	3.475.000	(1.075.000)	24 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000	3.475.000	(1.075.000)	24 %
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	62.497.000	62.497.000	100 %
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	62.497.000	62.497.000	100 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.424.695.711	4.321.556.278	(103.139.433)	2 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.424.695.711	4.321.556.278	(103.139.433)	2 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.424.695.711	4.321.556.278	(103.139.433)	2 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.424.695.711	4.321.556.278	(103.139.433)	2 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.099.944.394	13.168.456.059	4.068.511.665	45 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000	0	(600.000.000)	100 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	600.000.000	0	(600.000.000)	100 %
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	600.000.000	0	(600.000.000)	100 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000	29.520.000	27.020.000	1.081 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.500.000	29.520.000	27.020.000	1.081 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.500.000	29.520.000	27.020.000	1.081 %
4.1.04.05	Jasa Giro	497.515.774	497.917.922	402.148	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	435.515.382	435.917.530	402.148	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	435.515.382	435.917.530	402.148	0 %
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	62.000.392	62.000.392	0	0 %
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	62.000.392	62.000.392	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	800.000.000	2.500.000.000	1.700.000.000	213 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000	2.500.000.000	1.700.000.000	213 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000	2.500.000.000	1.700.000.000	213 %

4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.815.341.873	4.674.649.292	(2.140.692.581)	31 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000	655.174.076	(2.144.825.924)	77 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000	655.174.076	(2.144.825.924)	77 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.015.341.873	4.019.475.216	4.133.343	0 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.015.341.873	4.019.475.216	4.133.343	0 %
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	153.000.000	200.760.000	47.760.000	31 %
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	153.000.000	200.760.000	47.760.000	31 %
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	153.000.000	200.760.000	47.760.000	31 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	4.600.000.000	4.600.000.000	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	4.600.000.000	4.600.000.000	100 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	4.600.000.000	4.600.000.000	100 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	1.231.665	1.231.665	100 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	1.231.665	1.231.665	100 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0	1.231.665	1.231.665	100 %
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.150.000	8.650.000	(7.500.000)	46 %
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	12.500.000	5.000.000	(7.500.000)	60 %
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.500.000	5.000.000	(7.500.000)	60 %
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	3.650.000	3.650.000	0	0 %
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.650.000	3.650.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	215.436.747	655.727.180	440.290.433	204 %
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	187.039	0	(187.039)	100 %
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	187.039	0	(187.039)	100 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	215.034.599	215.034.599	0	0 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	215.034.599	215.034.599	0	0 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	440.692.581	440.692.581	100 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0	431.482.581	431.482.581	100 %
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	9.210.000	9.210.000	100 %
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	215.109	0	(215.109)	100 %
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	215.109	0	(215.109)	100 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	785.998.136.547	813.118.822.861	27.120.686.314	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.140.417.000	782.181.818.900	17.041.401.900	2 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	643.612.022.000	643.818.687.900	206.665.900	0 %

4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.273.295.000	5.418.094.000	144.799.000	3 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	450.679.000	450.679.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.541.215.000	1.541.215.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	144.799.000	144.799.000	100 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	345.574.000	345.574.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.271.000	1.271.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.934.556.000	2.934.556.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	456.993.936.000	456.993.936.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	433.600.294.000	433.600.294.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.993.642.000	21.993.642.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.844.039.000	103.269.034.000	(575.005.000)	1 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	912.586.000	912.586.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.711.273.000	15.711.273.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.020.321.000	8.020.321.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304.858.000	304.858.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.138.763.000	1.795.327.000	(343.436.000)	16 %
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.604.200.000	2.604.200.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.902.791.000	23.671.222.000	(231.569.000)	1 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	14.491.066.000	14.491.066.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.676.477.000	2.676.477.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.781.706.000	5.781.706.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	6.190.090.000	6.190.090.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.869.851.000	4.869.851.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	16.240.057.000	16.240.057.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	77.500.752.000	78.137.623.900	636.871.900	1 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.372.440.000	23.066.911.900	694.471.900	3 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	940.000.000	940.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	23.159.779.000	23.159.779.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.473.500.000	1.473.500.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.451.670.000	3.451.670.000	0	0 %

4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.335.600.000	1.368.000.000	32.400.000	2 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	622.900.000	532.900.000	(90.000.000)	14 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.976.680.000	5.976.680.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.443.151.000	11.443.151.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.121.087.000	5.121.087.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	457.770.000	457.770.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	532.100.000	532.100.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.075.000	614.075.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	16.834.736.000	16.834.736.000	100 %
4.2.01.02.01	DID	0	16.834.736.000	16.834.736.000	100 %
4.2.01.02.01.0001	DID	0	16.834.736.000	16.834.736.000	100 %
4.2.01.05	Dana Desa	121.528.395.000	121.528.395.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	121.528.395.000	121.528.395.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	121.528.395.000	121.528.395.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.857.719.547	30.937.003.961	10.079.284.414	48 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.857.719.547	30.937.003.961	10.079.284.414	48 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.857.719.547	30.937.003.961	10.079.284.414	48 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.158.484.401	6.131.670.850	1.973.186.449	47 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.823.699.040	3.700.652.635	1.876.953.595	103 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.740.299.658	11.010.602.360	6.270.302.702	132 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.522.603	17.566.113	9.043.510	106 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.126.713.845	10.076.512.003	(50.201.842)	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.808.190.000	8.058.190.000	250.000.000	3 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	250.000.000	250.000.000	100 %
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	250.000.000	250.000.000	100 %
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0	250.000.000	250.000.000	100 %
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0	250.000.000	250.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000	7.808.190.000	0	0 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000	7.808.190.000	0	0 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000	7.808.190.000	0	0 %
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000	7.808.190.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	841.837.100.522	883.772.847.246	41.935.746.724	5 %

5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	520.794.574.714	567.448.292.714	46.653.718.000	9 %
5.1.01	Belanja Pegawai	346.774.367.893	342.377.696.511	(4.396.671.382)	1 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	269.972.921.343	264.945.234.020	(5.027.687.323)	2 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	200.622.608.784	200.493.306.256	(129.302.528)	0 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	182.000.073.422	180.076.181.832	(1.923.891.590)	1 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	18.622.535.362	20.417.124.424	1.794.589.062	10 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.866.692.382	19.461.853.925	(2.404.838.457)	11 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.505.447.138	17.121.285.423	(1.384.161.715)	7 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.361.245.244	2.340.568.502	(1.020.676.742)	30 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.606.671.125	5.967.405.608	(639.265.517)	10 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.606.671.125	5.967.405.608	(639.265.517)	10 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.115.073.990	13.010.494.550	(104.579.440)	1 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.182.693.970	11.091.188.550	(91.505.420)	1 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.932.380.020	1.919.306.000	(13.074.020)	1 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.142.425.477	3.235.293.584	92.868.107	3 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.012.925.477	3.037.641.584	24.716.107	1 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	129.500.000	197.652.000	68.152.000	53 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.151.097.368	12.302.641.782	(848.455.586)	6 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.134.514.296	10.860.614.746	(273.899.550)	2 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.016.583.072	1.442.027.036	(574.556.036)	28 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	416.406.525	456.295.857	39.889.332	10 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	416.406.525	456.295.857	39.889.332	10 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.512.275	3.124.208	(388.067)	11 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.971.049	2.695.144	(275.905)	9 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	541.226	429.064	(112.162)	21 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.217.760.246	8.386.166.246	(831.594.000)	9 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.217.760.246	8.386.166.246	(831.594.000)	9 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	455.004.182	405.430.171	(49.574.011)	11 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	455.004.182	405.430.171	(49.574.011)	11 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.375.668.989	1.223.221.833	(152.447.156)	11 %

5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.375.668.989	1.223.221.833	(152.447.156)	11 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	18.687.624.396	19.504.597.062	816.972.666	4 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.687.624.396	19.504.597.062	816.972.666	4 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.687.624.396	19.504.597.062	816.972.666	4 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.476.717.764	46.035.541.559	(441.176.205)	1 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	361.975.043	388.403.247	26.428.204	7 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.375.000	2.789.062	(1.585.938)	36 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	35.000.000	63.348.750	28.348.750	81 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0	159.375	159.375	100 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.775.000	2.868.750	(906.250)	24 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	250.000	159.375	(90.625)	36 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	228.575.043	240.984.185	12.409.142	5 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	75.000.000	63.750.000	(11.250.000)	15 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000	14.343.750	(656.250)	4 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	801.000.000	45.000.000	(756.000.000)	94 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	756.000.000	0	(756.000.000)	100 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	24.826.019.500	23.159.779.000	(1.666.240.500)	7 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	24.826.019.500	23.159.779.000	(1.666.240.500)	7 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.094.962.750	3.451.670.000	356.707.250	12 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.094.962.750	3.451.670.000	356.707.250	12 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0	1.785.500.000	1.785.500.000	100 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0	1.785.500.000	1.785.500.000	100 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.185.671.271	8.911.519.312	(274.151.959)	3 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.185.671.271	8.911.519.312	(274.151.959)	3 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.107.163.200	7.191.130.000	83.966.800	1 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.037.413.200	5.466.000.000	(571.413.200)	9 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.045.400.000	1.700.280.000	654.880.000	63 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	24.350.000	24.850.000	500.000	2 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.099.926.000	1.102.540.000	2.614.000	0 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36.390.000	30.510.000	(5.880.000)	16 %
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.063.536.000	1.072.030.000	8.494.000	1 %

5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.224.390	11.238.224.390	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800	47.245.800	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800	47.245.800	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600	56.487.600	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600	56.487.600	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000	56.154.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000	56.154.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	814.233.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	814.233.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610	104.315.610	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610	104.315.610	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.409.050	9.409.050	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.409.050	9.409.050	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000	472.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000	472.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.950	516.950	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.950	516.950	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.566.222.380	2.566.222.380	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.934.040	49.934.040	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.736.196	4.736.196	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.552.144	3.552.144	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.508.000.000	2.508.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000	4.659.600.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000	4.659.600.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0	211.597.044	211.597.044	100 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0	75.018.380	75.018.380	100 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0	492.187	492.187	100 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0	13.826.250	13.826.250	100 %

5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0	28.125	28.125	100 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	0	506.250	506.250	100 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0	28.125	28.125	100 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	46.356.193	46.356.193	100 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0	11.250.000	11.250.000	100 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	2.531.250	2.531.250	100 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0	136.578.664	136.578.664	100 %
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0	136.578.664	136.578.664	100 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	398.880.000	442.502.436	43.622.436	11 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000	331.622.436	43.622.436	15 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000	331.622.436	43.622.436	15 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.784.218.295	194.242.288.346	45.458.070.051	31 %
5.1.02.01	Belanja Barang	53.565.522.033	63.543.558.824	9.978.036.791	19 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.563.684.533	63.543.558.824	9.979.874.291	19 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	213.279.750	173.916.715	(39.363.035)	18 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	146.250.977	577.615.300	431.364.323	295 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.505.158.500	3.448.213.820	(56.944.680)	2 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	32.514.900	40.775.260	8.260.360	25 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	274.743.190	257.916.571	(16.826.619)	6 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	870.772.519	1.126.040.322	255.267.803	29 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.000.000	37.696.000	7.696.000	26 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	974.110.629	1.170.407.121	196.296.492	20 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.220.496.095	1.400.549.420	180.053.325	15 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	35.768.250	23.131.000	(12.637.250)	35 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.359.002.969	5.530.735.237	171.732.268	3 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.273.398.548	1.142.412.051	(130.986.497)	10 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.560.000	32.350.500	21.790.500	206 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	194.637.375	186.673.875	(7.963.500)	4 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.741.746.450	1.529.263.523	(212.482.927)	12 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	509.951.740	518.968.317	9.016.577	2 %

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	261.937.128	261.007.087	(930.041)	0 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.529.595	2.021.995	(2.507.600)	55 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	17.620.000	63.512.000	45.892.000	260 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.362.500	72.800.000	42.437.500	140 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68.522.260	154.581.860	86.059.600	126 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.334.162.682	4.763.089.800	(571.072.882)	11 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.047.252.283	5.651.381.148	(395.871.135)	7 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.205.274.250	717.650.750	(1.487.623.500)	67 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.123.673.566	13.090.188.841	2.966.515.275	29 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.696.305.642	2.508.815.638	(187.490.004)	7 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	499.030.000	339.147.000	(159.883.000)	32 %
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	40.400.000	6.200.000	(34.200.000)	85 %
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	25.165.092	0	(25.165.092)	100 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.164.830	5.866.774.060	366.609.230	7 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	657.763.200	702.485.000	44.721.800	7 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	432.000.000	2.805.765.000	2.373.765.000	549 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.505.043.833	1.599.543.833	94.500.000	6 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.521.004.480	3.995.953.630	2.474.949.150	163 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0	285.628.000	285.628.000	100 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	84.484.600	0	(84.484.600)	100 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.409.260	14.818.520	7.409.260	100 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	74.620.000	74.620.000	100 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.470.000	126.475.000	83.005.000	191 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.849.720	5.699.440	2.849.720	100 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.849.720	5.699.440	2.849.720	100 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	26.250.000	141.500.000	115.250.000	439 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	33.768.000	25.593.750	(8.174.250)	24 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.837.500	0	(1.837.500)	100 %
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	787.500	0	(787.500)	100 %
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.050.000	0	(1.050.000)	100 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	43.974.657.635	65.828.683.352	21.854.025.717	50 %

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.117.157.145	45.412.478.192	16.295.321.047	56 %
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	344.400.000	139.000.000	(205.400.000)	60 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.449.300.000	2.110.100.000	660.800.000	46 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.791.850.000	5.670.125.000	(2.121.725.000)	27 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23.750.000	11.250.000	(12.500.000)	53 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.028.350.000	973.700.000	(54.650.000)	5 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	22.000.000	30.000.000	8.000.000	36 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	151.940.000	101.100.000	(50.840.000)	33 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	126.125.000	355.625.000	229.500.000	182 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	494.700.000	885.600.000	390.900.000	79 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.000.000	1.651.800.000	1.637.800.000	11.699 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.958.862.800	8.674.991.580	3.716.128.780	75 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.200.000	59.350.000	40.150.000	209 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	758.400.000	758.400.000	100 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	912.000.000	1.929.800.000	1.017.800.000	112 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0	96.000.000	96.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0	288.000.000	288.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0	345.600.000	345.600.000	100 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	854.777.500	803.200.000	(51.577.500)	6 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	52.500.000	81.660.000	29.160.000	56 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0	3.200.000	3.200.000	100 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	194.400.000	4.381.800.000	4.187.400.000	2.154 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	65.520.000	808.420.000	742.900.000	1.134 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	268.800.000	268.800.000	100 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.751.921.579	1.942.470.569	190.548.990	11 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	765.000.000	934.950.000	169.950.000	22 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000	703.300.000	697.300.000	11.622 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000	1.019.300.000	995.300.000	4.147 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0	310.400.000	310.400.000	100 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0	96.000.000	96.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.850.000	30.800.000	(3.050.000)	9 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.500.000	4.000.000	500.000	14 %

5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000	30.000.000	20.000.000	200 %
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0	393.325.080	393.325.080	100 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	824.000.050	856.850.152	32.850.102	4 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.300.000	95.750.000	58.450.000	157 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	9.500.000	9.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	13.060.000	181.920.515	168.860.515	1.293 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	240.000	587.040.000	586.800.000	244.500 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	212.400.000	185.850.000	(26.550.000)	13 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	51.032.000	116.832.500	65.800.500	129 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	0	115.200.000	115.200.000	100 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	21.409.400	10.009.400	(11.400.000)	53 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	259.773.500	273.602.251	13.828.751	5 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.511.203.313	2.478.547.096	(32.656.217)	1 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.000.000	5.400.000	(3.600.000)	40 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.553.046.450	1.524.788.694	(28.257.756)	2 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	188.419.000	132.803.000	(55.616.000)	30 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	531.520.568	501.372.021	(30.148.547)	6 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	239.000.000	245.800.000	6.800.000	3 %
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.558.305.985	2.189.145.334	630.839.349	40 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.397.696.192	4.382.056.472	1.984.360.280	83 %
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	1.274.088.960	1.274.088.960	100 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	2.397.696.192	3.017.869.592	620.173.400	26 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0	90.097.920	90.097.920	100 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	372.995.200	791.963.400	418.968.200	112 %
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	9.400.000	8.000.000	(1.400.000)	15 %
5.1.02.02.04.0024	Belanja Sewa Mesin Bor	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	111.200.000	157.600.000	46.400.000	42 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	62.750.000	181.500.000	118.750.000	189 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.200.000	52.300.000	31.100.000	147 %
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4.945.200	22.253.400	17.308.200	350 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.000.000	0	(4.000.000)	100 %

5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.000.000	46.000.000	6.000.000	15 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	87.000.000	189.400.000	102.400.000	118 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.100.000	5.860.000	3.760.000	179 %
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	2.500.000	2.500.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	19.000.000	39.000.000	20.000.000	105 %
5.1.02.02.04.0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0347	Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	3.900.000	8.550.000	4.650.000	119 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	792.139.180	1.655.705.516	863.566.336	109 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	182.501.660	165.272.980	(17.228.680)	9 %
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	15.000.000	4.500.000	(10.500.000)	70 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	594.637.520	1.299.209.960	704.572.440	118 %
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	134.222.576	134.222.576	100 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	4.500.000	4.500.000	100 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	48.000.000	48.000.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.309.549.918	7.975.309.772	3.665.759.854	85 %
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	85.213.538	147.625.000	62.411.462	73 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	340.389.075	433.449.678	93.060.603	27 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	75.200.000	379.818.216	304.618.216	405 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.088.796.739	1.527.820.739	439.024.000	40 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	570.707.000	917.719.620	347.012.620	61 %
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	12.000.000	0	(12.000.000)	100 %
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	376.820.000	500.000.000	123.180.000	33 %
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0	174.200.000	174.200.000	100 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	633.276.366	841.468.189	208.191.823	33 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	122.700.000	114.643.260	(8.056.740)	7 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	538.307.500	2.380.560.070	1.842.252.570	342 %
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	216.139.700	208.005.000	(8.134.700)	4 %
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	250.000.000	250.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	400.000.000	710.000.000	310.000.000	78 %
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0	100.000.000	100.000.000	100 %

5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	400.000.000	610.000.000	210.000.000	53 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000	7.500.000	(167.500.000)	96 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	80.000.000	0	(80.000.000)	100 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	95.000.000	7.500.000	(87.500.000)	92 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.410.120.000	4.893.670.000	(1.516.450.000)	24 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	196.000.000	68.600.000	(127.400.000)	65 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.507.770.000	4.033.520.000	(474.250.000)	11 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.500.000.000	656.600.000	(843.400.000)	56 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	206.350.000	134.950.000	(71.400.000)	35 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.249.191.096	10.895.490.820	5.646.299.724	108 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	157.258.701	43.719.810	(113.538.891)	72 %
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	142.683.431	0	(142.683.431)	100 %
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	14.575.270	43.719.810	29.144.540	200 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.604.619.397	2.104.454.502	499.835.105	31 %
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	56.632.992	26.432.328	(30.200.664)	53 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000	5.000.000	(25.000.000)	83 %
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	832.152.645	903.993.910	71.841.265	9 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.690.000	110.000.000	70.310.000	177 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.035.000	0	(1.035.000)	100 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.868.620	10.350.400	(27.518.220)	73 %
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000	200.000.000	190.000.000	1.900 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	51.760.000	200.200.000	148.440.000	287 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.391.500	7.141.500	(250.000)	3 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	55.510.000	58.800.000	3.290.000	6 %
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	7.250.000	143.289.900	136.039.900	1.876 %
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	185.000.000	185.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	54.000.000	135.540.000	81.540.000	151 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	227.758.640	111.596.464	(116.162.176)	51 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.570.000	5.110.000	(1.460.000)	22 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.650.062.998	7.694.903.882	5.044.840.884	190 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	848.906.803	716.295.189	(132.611.614)	16 %

5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	34.996.484	0	(34.996.484)	100 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0	21.000.000	21.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.722.294.711	6.137.531.161	4.415.236.450	256 %
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	671.002.532	671.002.532	100 %
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	23.865.000	23.865.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	101.210.000	101.210.000	100 %
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	15.000.000	9.000.000	(6.000.000)	40 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	837.250.000	1.052.412.626	215.162.626	26 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	450.000.000	112.500.000	(337.500.000)	75 %
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0	25.000.000	25.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	75.000.000	362.800.000	287.800.000	384 %
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0	44.200.000	44.200.000	100 %
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	200.000.000	160.000.000	(40.000.000)	20 %
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0	11.000.526	11.000.526	100 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000	229.662.100	224.662.100	4.493 %
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	7.250.000	7.250.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	35.000.000	35.000.000	0	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.632.692.793	32.271.785.254	4.639.092.461	17 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.632.692.793	32.271.785.254	4.639.092.461	17 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.847.502.793	18.643.500.254	5.795.997.461	45 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.785.190.000	13.628.285.000	(1.156.905.000)	8 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.438.046.285	2.138.121.000	700.074.715	49 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	424.345.000	562.100.000	137.755.000	32 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	119.545.000	254.000.000	134.455.000	112 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	304.800.000	308.100.000	3.300.000	1 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.013.701.285	1.576.021.000	562.319.715	55 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.013.701.285	1.576.021.000	562.319.715	55 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.924.108.453	19.564.649.096	2.640.540.643	16 %

5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.924.108.453	19.564.649.096	2.640.540.643	16 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.924.108.453	19.564.649.096	2.640.540.643	16 %
5.1.03	Belanja Bunga	13.395.930.204	10.569.917.657	(2.826.012.547)	21 %
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	13.395.930.204	10.569.917.657	(2.826.012.547)	21 %
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	13.395.930.204	10.569.917.657	(2.826.012.547)	21 %
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	13.395.930.204	10.569.917.657	(2.826.012.547)	21 %
5.1.05	Belanja Hibah	3.116.683.322	13.751.390.200	10.634.706.878	341 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.615.682.302	13.250.389.180	10.634.706.878	407 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.059.092.968	11.563.289.180	9.504.196.212	462 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.059.092.968	11.563.289.180	9.504.196.212	462 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	207.200.000	1.496.700.000	1.289.500.000	622 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	1.496.700.000	1.496.700.000	100 %
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	207.200.000	0	(207.200.000)	100 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	349.389.334	190.400.000	(158.989.334)	46 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	349.389.334	190.400.000	(158.989.334)	46 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020	501.001.020	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020	501.001.020	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020	501.001.020	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.723.375.000	6.507.000.000	(2.216.375.000)	25 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.723.375.000	6.507.000.000	(2.216.375.000)	25 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.723.375.000	6.507.000.000	(2.216.375.000)	25 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.723.375.000	6.507.000.000	(2.216.375.000)	25 %
5.2	BELANJA MODAL	123.409.062.571	217.215.730.245	93.806.667.674	76 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.510.629	24.889.535.436	(2.970.975.193)	11 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	485.910.631	485.910.631	100 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	83.429.840	83.429.840	100 %
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0	83.429.840	83.429.840	100 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	402.480.791	402.480.791	100 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	11.049.791	11.049.791	100 %
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0	6.360.000	6.360.000	100 %

5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	385.071.000	385.071.000	100 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.479.356.950	851.050.000	(628.306.950)	42 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.479.356.950	850.000.000	(629.356.950)	43 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	929.356.950	300.000.000	(629.356.950)	68 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	1.050.000	1.050.000	100 %
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	1.050.000	1.050.000	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	80.193.266	39.215.665	(40.977.601)	51 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	80.193.266	39.215.665	(40.977.601)	51 %
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	13.943.266	39.215.665	25.272.399	181 %
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	66.250.000	0	(66.250.000)	100 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.668.590.273	5.894.219.836	1.225.629.563	26 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	966.035.776	1.229.401.500	263.365.724	27 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	419.587.776	39.943.000	(379.644.776)	90 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	546.448.000	1.189.458.500	643.010.500	118 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.434.775.624	4.412.760.088	977.984.464	28 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.986.448.464	3.657.345.488	670.897.024	22 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	116.490.675	139.519.600	23.028.925	20 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	34.442.709	61.711.459	27.268.750	79 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	297.393.776	528.911.171	231.517.395	78 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	25.272.370	25.272.370	100 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	267.778.873	252.058.248	(15.720.625)	6 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	137.933.248	147.933.248	10.000.000	7 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	129.845.625	104.125.000	(25.720.625)	20 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.765.250	97.269.964	37.504.714	63 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.443.726	83.169.964	64.726.238	351 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.029.375	22.069.964	16.040.589	266 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.414.351	61.100.000	48.685.649	392 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	27.221.524	0	(27.221.524)	100 %

5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.257.068	0	(14.257.068)	100 %
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	12.964.456	0	(12.964.456)	100 %
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	14.100.000	14.100.000	0	0 %
5.2.02.06.04.0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	14.100.000	14.100.000	0	0 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.865.972.881	7.981.445.682	(5.884.527.199)	42 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.865.972.881	7.981.445.682	(5.884.527.199)	42 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.034.045.324	2.650.945.750	(1.383.099.574)	34 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	9.831.927.557	5.330.499.932	(4.501.427.625)	46 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.080.930.725	6.027.736.480	4.946.805.755	458 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	1.116.000.000	1.116.000.000	100 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	1.116.000.000	1.116.000.000	100 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.060.000.000	4.793.827.900	3.733.827.900	352 %
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	60.000.000	68.827.900	8.827.900	15 %
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.000.000.000	4.725.000.000	3.725.000.000	373 %
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	20.930.725	117.908.580	96.977.855	463 %
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	20.930.725	117.908.580	96.977.855	463 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.905.909.301	1.315.883.202	(590.026.099)	31 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.779.777.288	1.080.278.248	(699.499.040)	39 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	30.500.150	30.500.150	100 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.779.777.288	1.048.261.098	(731.516.190)	41 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	1.517.000	1.517.000	100 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	126.132.013	235.604.954	109.472.941	87 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	14.079.513	0	(14.079.513)	100 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	112.052.500	235.604.954	123.552.454	110 %
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	5.828.850	0	(5.828.850)	100 %
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	5.828.850	0	(5.828.850)	100 %
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	5.828.850	0	(5.828.850)	100 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	105.474.444	105.474.444	100 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	105.474.444	105.474.444	100 %

5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0	105.474.444	105.474.444	100 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	50 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	50 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	50 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.500.000	0	(8.500.000)	100 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.500.000	0	(8.500.000)	100 %
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	8.500.000	0	(8.500.000)	100 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.665.463.133	1.999.629.532	(2.665.833.601)	57 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.665.463.133	1.999.629.532	(2.665.833.601)	57 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.665.463.133	1.999.629.532	(2.665.833.601)	57 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.474.837.072	27.217.456.478	7.742.619.406	40 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.694.968.582	25.485.456.478	8.790.487.896	53 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.236.721.582	24.027.209.478	8.790.487.896	58 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.202.116.200	2.850.125.300	1.648.009.100	137 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	875.000.000	0	(875.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0	862.163.000	862.163.000	100 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.895.280.640	3.895.280.640	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.509.534.740	1.303.499.330	(2.206.035.410)	63 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.494.983.167	160.000.000	(1.334.983.167)	89 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	3.337.650.000	3.337.650.000	100 %
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	175.000.000	0	(175.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	344.496.560	344.496.560	0	0 %
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.001.873.200	3.001.873.200	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	107.299.075	6.846.886.075	6.739.587.000	6.281 %
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	60.000.000	0	(60.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	396.138.000	543.553.350	147.415.350	37 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0	475.437.023	475.437.023	100 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0	158.645.000	158.645.000	100 %

5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000	47.600.000	(127.400.000)	73 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.458.247.000	1.458.247.000	0	0 %
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.458.247.000	1.458.247.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.779.868.490	1.732.000.000	(1.047.868.490)	38 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.779.868.490	1.732.000.000	(1.047.868.490)	38 %
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	21.700.000	74.550.000	52.850.000	244 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.734.168.490	1.459.950.000	(1.274.218.490)	47 %
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	24.000.000	197.500.000	173.500.000	723 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.867.614.608	162.462.940.959	89.595.326.351	123 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.588.018.897	153.140.026.017	90.552.007.120	145 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	49.739.873.897	140.263.380.534	90.523.506.637	182 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	47.934.413.897	99.855.621.088	51.921.207.191	108 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0	33.450.333.741	33.450.333.741	100 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	571.760.000	1.791.760.000	1.220.000.000	213 %
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	0	108.650.000	108.650.000	100 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.233.700.000	5.057.015.705	3.823.315.705	310 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.848.145.000	12.876.645.483	28.500.483	0 %
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	12.848.145.000	12.848.145.000	0	0 %
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0	28.500.483	28.500.483	100 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.163.868.174	4.738.119.142	1.574.250.968	50 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0	80.578.861	80.578.861	100 %
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0	80.578.861	80.578.861	100 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0	123.520.000	123.520.000	100 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	0	123.520.000	123.520.000	100 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	725.000.000	1.175.000.000	450.000.000	62 %
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	385.000.000	485.000.000	100.000.000	26 %
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	340.000.000	690.000.000	350.000.000	103 %
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	1.047.500.000	1.047.500.000	100 %
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0	1.047.500.000	1.047.500.000	100 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.438.868.174	2.311.520.281	(127.347.893)	5 %
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.438.868.174	2.311.520.281	(127.347.893)	5 %
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0	0	0	0 %

5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	67.611.500	67.611.500	100 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	29.611.500	29.611.500	100 %
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	29.611.500	29.611.500	100 %
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	38.000.000	38.000.000	100 %
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	38.000.000	38.000.000	100 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.115.727.537	4.517.184.300	(2.598.543.237)	37 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.115.727.537	4.299.950.000	(2.815.777.537)	40 %
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	4.186.952.537	300.000.000	(3.886.952.537)	93 %
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	2.650.000.000	3.499.950.000	849.950.000	32 %
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	278.775.000	500.000.000	221.225.000	79 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	217.234.300	217.234.300	100 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	217.234.300	217.234.300	100 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.206.100.262	2.645.797.372	(560.302.890)	17 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.483.231.848	218.164.100	(1.265.067.748)	85 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.483.231.848	218.164.100	(1.265.067.748)	85 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0	18.164.100	18.164.100	100 %
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.483.231.848	200.000.000	(1.283.231.848)	87 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.868.414	2.427.633.272	704.764.858	41 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.868.414	2.427.633.272	704.764.858	41 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.868.414	2.427.633.272	704.764.858	41 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.282.225.300	780.713.896	(16.501.511.404)	95 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300	780.713.896	(16.501.511.404)	95 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300	780.713.896	(16.501.511.404)	95 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300	780.713.896	(16.501.511.404)	95 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300	780.713.896	(16.501.511.404)	95 %
5.4	BELANJA TRANSFER	155.077.412.722	171.163.834.550	16.086.421.828	10 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222	3.423.196.348	2.058.197.126	151 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.364.999.222	1.364.999.222	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222	1.364.999.222	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222	1.364.999.222	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0	2.058.197.126	2.058.197.126	100 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0	2.058.197.126	2.058.197.126	100 %

5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0	2.058.197.126	2.058.197.126	100 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.712.413.500	167.740.638.202	14.028.224.702	9 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.712.413.500	167.740.638.202	14.028.224.702	9 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.562.413.500	167.740.638.202	14.178.224.702	9 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.562.413.500	167.740.638.202	14.178.224.702	9 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.000.000	0	(150.000.000)	100 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.000.000	0	(150.000.000)	100 %
	Jumlah Belanja	816.563.275.307	956.608.571.405	140.045.296.098	17 %
	Total Surplus/(Defisit)	25.273.825.215	(72.835.724.159)	(98.109.549.374)	388 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	95.579.997.871	95.579.997.871	100 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	95.579.997.871	95.579.997.871	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0	7.611.806.292	7.611.806.292	100 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0	7.611.806.292	7.611.806.292	100 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0	7.611.806.292	7.611.806.292	100 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0	0	0	0 %
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0	0	0	0 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0	87.701.448.029	87.701.448.029	100 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0	87.701.448.029	87.701.448.029	100 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0	87.701.448.029	87.701.448.029	100 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	266.743.550	266.743.550	100 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	152.264.295	152.264.295	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	152.264.295	152.264.295	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	114.479.254	114.479.254	100 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	114.479.254	114.479.254	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	95.579.997.871	95.579.997.871	100 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.273.825.215	22.744.273.712	(2.529.551.503)	10 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %

6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.773.825.215	20.244.273.712	(2.529.551.503)	11 %
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	22.773.825.215	20.244.273.712	(2.529.551.503)	11 %
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	22.773.825.215	20.244.273.712	(2.529.551.503)	11 %
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	22.773.825.215	20.244.273.712	(2.529.551.503)	11 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.273.825.215	22.744.273.712	(2.529.551.503)	10 %
	Pembiayaan Netto	(25.273.825.215)	72.835.724.159	98.109.549.374	-388 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	122 %

